



RISALAH RAPAT KOMISI IV DPR RI
BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN,
DEWAN KELAUTAN INDONESIA SERTA PERUM BULOG

Tahun Sidang	:	2017-2018
Masa Persidangan	:	V
Rapat ke-	:	-
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Sifat Rapat	:	Terbuka
Dengan	:	Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Hari, Tanggal	:	Senin, 2 Juli 2018
Waktu	:	13.00 WIB s.d. selesai
Acara	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pengantar Ketua Rapat;2. Penjelasan DPR mengenai RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;3. Pandangan Presiden/Pemerintah mengenai RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;4. Pengesahan Jadwal Acara Pembahasan RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;5. Pengesahan Mekanisme Pembahasan; dan6. Penyerahan Daftar Inventaris Masalah RUU oleh Pemerintah Kepada Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat	:	Edhy Prabowo, M.M., M.B.A. (Ketua Komisi IV DPR RI)
Sekretaris Rapat	:	Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir	:	28 Anggota dari 48 Anggota Komisi IV DPR RI
Hadir Mitra Kerja	:	Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

ANGGOTA KOMISI IV DPR-RI:

1. EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.
2. Drs. H. ROEM KONO
3. Dr. MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.
4. VIVA YOGA MAULADI, M.Si.
5. DANIEL JOHAN
6. SUDIN
7. Drs. I MADE URIP, M.Si.
8. Ir. MINDO SIANIPAR
9. Ir. EFFENDI SIANIPAR
10. Ir. TAGORE ABUBAKAR
11. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S.
12. RAHMAD HANDOYO, S.Pi., M.M..
13. DJENDRI ALTING KEINTJEM, S.H., M.H.
14. H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.
15. ENDANG SRIKARTI HANDAYANIM S.H., M.Hum.
16. Ir. ENDRO HERMONO, M.B.A.
17. G. BUDISATRIO DJIWANDONO
18. Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.
19. VIVI SUMANTRI JAYABAYA, S.Sos.
20. Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR, S.P.
21. EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos.
22. INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, S.E., M.M.
23. Drs. H. IBNU MULTAZAM
24. Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.
25. Dr. HERMANTO, S.E., M.M.
26. Hj. KASRIAH
27. H. ASEP AHMAD MOUSHUL AFFANDY
28. SULAEMAN L. HAMZAH

ANGGOTA YANG IJIN:

1. ONO SURONO, S.T.
2. RIDWAN ANDI WITTIRI
3. ROBERT JOPPY KARDINAL, S.A.B.
4. SITI HEDIATI SOEHARTO, S.E.
5. A. A BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA
6. H. AGUNG WIDYANTOROM S.H., M.Si.
7. IR. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.
8. H. OO SUTISNA, S.H.
9. SUSI SYAHDONNA MARLENY BACHSIN, S.E., M.M.
10. dr. FELICITAS TALLULEMBANG
11. Drs. H. UMAR ARSAL
12. AHMAD YOHAN, M.Si.
13. Drs. H. TAUFIQ R. ABDULLAH
14. H. ACEP ADANG RUHIAT, M.Si.

15. Drs. H. MAHFUZ SIDIK, M.Si.
16. Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI, M.Si.
17. H. FADLY NURZAL, S.Ag.
18. Drs. FADHOLI
19. Drs. H. MUCHTAR LUTHFI A. MUTTY, M.Si.
20. FAUZH H. AMRO, M.Si.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.):

Bissmillahirrahmanirahim.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat saudara Menteri Pertanian beserta jajarannya,
Yang terhormat saudara Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, atau yang mewakili beserta jajarannya,
Yang terhormat saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili beserta jajarannya,
Yang terhormat saudara Menteri Pekerjaan Umum yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sekjen,
Yang terhormat saudara Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia atau yang mewakili beserta jajarannya, yang mewakili Presiden dalam Pembahasan Tingkat I atas Rancangan Undang-undang Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan,
Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati, serta
Hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat hari ini pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini kita dapat mengadakan rapat kerja dalam keadaan sehat wal afiat, guna melaksanakan tugas DPR RI yaitu bidang legislasi. Sebelum dilanjutkan masih dalam suasana bulan Sawal perkenankan kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1439 Hijriah minnal aidzin wal faidzin mohon maaf lahir dan batin.

Sesuai dengan jadwal rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan V tahun Sidang 2017 – 2018 yang telah diputuskan dalam rapat Badan Musyawarah DPRI RI dengan Pimpinan Fraksi tanggal 25 April 2018, keputusan rapat intern Komisi IV DPR RI tanggal 26 Mei 2018, dan surat Presiden Nomor, R-18/Pres/04/2018 tanggal 6 April 2018 hal penunjukkan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan serta surat wakil Ketua DPR RI/KOREKKU Nomor PW/008345/DPR RI/04/2018 tanggal 26 April 2018 hal bahwa pembahasan Rancangan undang-undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan diserahkan kepada Komisi IV DPR RI pada hari ini Senin, 2 Juli 2018

Komisi IV DPR RI menyelenggarakan rapat kerja dengan pemerintah yang ditugaskan oleh Presiden dalam pembahasan tingkat I Rancangan Undang-undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

Bapak, Ibu yang kami hormati,

Menurut laporan dari sekretariat Komisi IV DPR RI rapat ini baru hadir oleh 7 anggota dari 48 anggota, dan dari 4 fraksi. Sesuai ketentuan kita belum bisa melaksanakan rapat ini, namun kita bisa melaksanakan setelah kita melakukan skors. Skors kita tinggal usulkan ada berapa menit, mungkin dari teman-teman berapa menit? 5 (lima) menit, pak Menteri kita skors 5 menit. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim rapat saya buka dan diskors 5 menit.

Rapat dibuka pukul: 13.15 WIB
Rapat skors pukul 13.15 WIB
Skors dibuka pukul 13.25 WIB

Bapak, Ibu sekalian yang kami hormati,

Skors saya cabut,

Sesuai undangan rapat, rapat kerja hari ini dimulai pukul 13.00 WIB dan akan diakhiri pukul 15.00 WIB, bisa juga lebih cepat kalau materinya bisa lebih cepat. Jadi tergantung dari materi kita nanti, sesuai dengan ketentuan Tata Tertib Pasal 226 Ayat (1) atau sesuai kesepakatan apabila belum selesai bisa kita perpanjang, atau bisa kita selesaikan terlebih dahulu kalau sudah selesai. Dengan agenda rapat yaitu:

1. Pengantar ketua rapat;
2. Penjelasan Komisi IV DPR RI terhadap RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
3. Pandangan Presiden atau Pemerintah terhadap RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
4. Pengesahan mekanisme dan jadwal acara pembahasan;
5. Penyerahan daftar inventaris masalah RUU oleh pemerintah kepada Komisi IV DPR RI. Dan
6. Penutup.

Apakah acara tersebut dapat kita setujui?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak, Ibu sekalian,
Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Saudara Menteri serta hadirin yang kami hormati.

Untuk mempersingkat waktu, dan memahami lebih jauh mengenai RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan kami persilakan yang terhormat Saudara DR.

Michael Wattimena, S.E., M.M. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI untuk menyampaikan penjelasan Komisi IV. Kami persilakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV (Dr. MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.):

Terima kasih pak Ketua, pak Edhy.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera dan selamat siang bagi kita semua,

PENJELASAN KOMISI IV DPR RI
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
SISTEM BUDIDAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN
DALAM RAPAT KERJA MASA PERSINDANGAN V
TAHUN SIDANG 2017 – 2018
SENIN, 2 JULI 2018

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang kami hormati Saudara Menteri Pertanian beserta jajarannya;
Yang kami hormati Saudara Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Kepala Badan
Pertanahan Nasional atau yang mewakili,
Yang terhormat saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili
beserta jajarannya,
Yang terhormat saudara Menteri Pekerjaan Umum yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu
Sekjen,
Yang terhormat saudara Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia
atau yang mewakili beserta jajarannya, dan
Hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang
Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan kasih karunianya, sehingga pada hari ini kita
dapat melaksanakan rapat dalam keadaan sehat wal afiat, guna melaksanakan salah
satu tugas dan fungsi DPR RI yaitu bidang legislasi.

Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati,

Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan berkeanekaragaman
sumber daya alam nabati, yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan, perlu
dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan perlu ditumbuh kembangkan dalam membangun nasional secara
menyeluruh dan terpadu, salah satunya adalah pembangunan nasional diarahkan untuk
meningkatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan petani. Dengan kata lain, bahwa
pertanian yang maju efisien, dan tangguh mempunyai peranan penting dalam

pencapaian tujuan pembangunan nasional, sehingga terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem Budidaya Pertanian sebagai bagian dari pertanian pada hakekatnya adalah sistem pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.

Oleh karena itu sejalan dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, untuk mewujudkan pertanian maju, efisien dan tangguh, sistem budidaya pertanian ini dikembangkan dengan berazaskan kebermanfaatan, keberlanjutan, kedaulatan, keterpaduan, kebersamaan, kemandirian, keterbukaan, efisiensi, berkeadilan, kearifan lokal, kelestarian fungsi lingkungan hidup dan perlindungan negara. Secara kongkrit penyelenggaraan sistem budidaya pertanian bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas keanekaragaman hasil pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, dan meningkatkan intensifikasi, dan diversifikasi pertanian dengan mempertimbangkan perubahan iklim.

Untuk mencapai hal tersebut pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melibatkan masyarakat dalam menyusun rencana pengembangan budidaya pertanian yang merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan sektoral, perencanaan menjadi penting dilakukan untuk merancang pembangunan dan pengembangan budidaya pertanian berkelanjutan.

Budidaya pertanian secara berkelanjutan pada prinsipnya merupakan paradigma atau sistem pengelolaan pertanian yang mengintegrasikan tiga elemen yaitu aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Sehingga manfaat pertanian tersebut dapat dinikmati hingga jangka panjang (*long times orientation*). Budidaya pertanian secara berkelanjutan dilakukan dengan memperhatikan daya dukung ekosistem mitigasi, adaptasi perubahan iklim, serta kelestarian lingkungan, guna mewujudkan sistem pertanian yang adil, maju, efisien, tangguh dan berkelanjutan. Penyelenggaraan budidaya pertanian dapat diselenggarakan melalui ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi, dengan mempertimbangkan perubahan iklim yang tidak terlepas dalam rangka sistem agribisnis secara menyeluruh. Yaitu dari tahap penggunaan lahan, yang menggunakan lahan dan/atau media tanam lainnya. Perbenihan, penanaman, pengluaran dan pemasukan benih tumbuhan dan benih hewan, bibit tumbuhan dan bibit hewan, hewan pemanfaatan air, perlindungan dan pemeliharaan pertanian, panen hingga paska panen. Keberhasilan pembangunan pertanian melalui penyelenggaraan budidaya pertanian, juga tidak akan berjalan dengan baik, apabila tidak didukung dengan ketersediaan sarana produksi budidaya pertanian. Adapun pemanfaatan lahan untuk keperluan budidaya pertanian disesuaikan dengan ketentuan tata ruang dan tata guna lahan. Yang digunakan dengan memperhatikan kesesuaian dan kemampuan lahan maupun pelestarian lingkungan hidup, khususnya konservasi tanah dan air.

Pelaksanaan budidaya pertanian harus dilakukan secara efektif dan efisien, oleh karena itu pembinaan sangat penting dan merupakan kewajiban dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga dengan kewenangannya. Selain pembinaan dan

pelaksanaan budidaya pertanian juga dilakukan pengawasan untuk menjamin mutu, sarana dan/atau produk budidaya pertanian agar sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, serta menanggulangi berbagai dampak negative yang merugikan masyarakat luas dan kelestarian fungsi lingkungan hidup itu sendiri. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan budidaya pertanian sangat-sangat dibutuhkan, sebagai penyeimbang yang dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran, perbaikan dan/atau bantuan.

Secara umum materi dalam Undang-undang ini meliputi perencanaan budidaya pertanian, penggunaan lahan, perbenihan dan penanaman, pengeluaran serta pemasukan tumbuhan, benih tanaman, benih hewan, bibit tanaman, bibit hewan dan hewan. Pemanfaatan air, perlindungan dan pemeliharaan pertanian, panen dan paska panen, sarana budidaya pertanian, dan prasarana budidaya pertanian, tata ruang dan tata guna lahan budidaya pertanian. Usaha budidaya pertanian, pembinaan, pengawasan, perlindungan perberdayaan petani, penguatan kelembagaan pertanian, sistem informasi peran serta masyarakat serta sangsi.

Bapak, Ibu dan hadirin yang kami muliakan,

Pokok-pokok materi dalam Rancangan Undang-undang Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan diatur dalam 20 BAB, dan 127 Pasal, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	Ketentuan Umum
BAB II	Perencanaan Budidaya Pertanian;
BAB III	Penggunaan Lahan
BAB IV	Perbenihan dan Penanaman Bagian Kesatu Perbenihan Bagian Kedua Perlindungan Paritas Pertanian Bagian Ketiga Penanaman
BAB V	Pengeluaran dan Pemasukan Tumbuhan, Benih, Bibit dan Hewan
BAB VI	Pemanfaatan Air
BAB VII	Perlindungan dan Pemeliharaan Pertanian Bagian Kesatu Perlindungan Pertanian, Bagian Kedua Pemeliharaan Pertanian,
BAB VIII	Panen dan Paska Panen Bagian Kesatu Panen Bagian Kedua Paska Panen
BAB IX	Sarana Produksi dan Prasarana Budidaya Pertanian Bagian Kesatu Sarana Produksi Budidaya Pertanian Bagian kedua Prasarana Budidaya Pertanian
BAB X	Tata Ruang dan Tata Guna Lahan Budidaya Pertanian
BAB XI	Usaha Budidaya Pertanian
BAB XII	Pembinaan dan Pengawasan Bagian Kesatu Pembinaan Bagian kedua Pengawasan
BAB XII	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

BAB XIV	Penguatan Kelembagaan Pertanian
BAB XV	Sistem Informasi
BAB XVI	Peran Serta Masyarakat
BAB XVII	Penyidikan
BAB XVIII	Sangsi Administratif
BAB XIX	Ketentuan Pidana, dan
BAB XX	Ketentuan Penutup.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, serta
Bapak, Ibu, hadirin yang kami muliakan.

Yang pertama yang terhormat Saudara Menteri Pertanian,
Yang Terhormat Saudara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepal Badan Pertanahan Nasional atau yang mewakili,
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili,
Yang terhormat Saudara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau yang mewakili,
Yang terhormat saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili, dan
Bapak, Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan.

Demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, harapan kami setelah dilakukannya pembahasan tingkat I melalui rapat kerja, rapat panitia kerja, rapat tim perumus atau tim kecil dan rapat tim sinkronisasi serta pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna RUU ini segera diundangkannya, dan disosialisasikan serta memberikan faedah bagi bangsa Indonesia, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang melimpahkan rahmat dan kasih karunianya kepada kita semuanya.

Sekian dan terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pimpinan Komisi IV DPR RI
Wakil Ketua,

Dr. Michael Wattimena, S.E., M.M.
Anggota: A-457

Terima kasih pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih pak Michael saya pikir penjelasannya pak Michael yang sudah tersistem ini sudah menjawab kita hari ini rapatnya tidak lama sebenarnya. Tapi tidak tahu kalau pak Menteri mau lama yang kita lama juga.

Terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan, kami persilakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangannya.

Kami persilakan.

MENTERI PERTANIAN (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati bapak Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang kami hormati Menteri Agraria dan Tata Ruang dari Kepala Badan Pertanahan Nasional,
Yang terhormat Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili,
Yang terhormat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau yang mewakili,
Yang terhormat Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia atau yang mewakili,
Para pejabat kementerian, lembaga terkait, dan
Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunianya, pada hari ini kita dapat hadir pada rapat kerja antara Komisi IV DPR RI dengan pemerintah untuk membahar Rancangan Undang-undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dalam keadaan sehat wal afiat.

Dalam pembahasan RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang merupakan inisiatif DPR RI, Presiden Republik Indonesia melalui Surat Nomor R-18/Pres/04/2018 telah menunjuk wakil pemerintah dan menugaskan Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Hukum dan HAM.

Bapak Pimpinan dan Anggota Dewan, serta
Hadirin yang kami hormati.

Perkenankan kami sebagai wakil pemerintah menyampaikan pandangan mengenai Rancangan Undang-undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa dalam proses penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan DPR telah melaksanakan melalui kajian akademis yang mendalam dan melibatkan para ahli dari berbagai universitas, para pakar dan *stake holder* terkait budidaya pertanian. Demikian juga pemerintah menyusun Rancangan Undang-undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan ini dilaksanakan secara intensif dalam forum lintas kementerian, dari lembaga selain 5 kementerian yang ditugaskan oleh Bapak Presiden, kami melibatkan pula kementerian lembaga terkait. Untuk itu kami mengapresiasi semuanya yang telah berperan serta dalam proses penyusunan Rancangan Undang-

undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan atas inisiatif DPR RI ini. Baik dalam forum diskusi secara formal maupun secara informal. RUU dimaksud telah kami cermati, kaji dan bahas bersama dengan kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, serta Kementerian Lembaga terkait.

Selanjutnya dilakukan penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) dimana dihasilkan sejumlah 588 DIM, sebagai bahan penyempurnaan substansif pengaturan Rancangan Undang-undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Dalam kaitan budidaya pertanian yang saat ini diatur dengan undang-undang nomor 12 tahun 1992, tentang Sistem Budidaya Tanaman juga telah diundangkan, Undang-Undang Sektor Pertanian seperti Undang-undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Holtikultura, Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sehingga substansi pengaturan dalam undang-undang tersebut yang masih berlaku mengenai ketentuan dan untuk komposisi tanaman pangan dan hijauan, pakan ternak, pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian. Dalam Rancangan Undang-undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan kami melihat beberapa substansi baru antara lain berkaitan dengan pertanian konservasi, pemanfaatan air, sumber daya genetik, pertanian dan pemuliaan oleh petani kecil dalam negeri.

Pemerintah berpendapat bahwa, Rancangan Undang-undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan telah memuat cukup lengkap dan mendasar, dan telah memperhatikan kewenangan pengaturan yang ada dalam undang-undang sektor yang lain, seperti sektor agrarian dan tata ruang, sumber daya air, pembagian kewenangan pusat dan daerah, serta penyempurnaan pengaturan yang telah ada dalam undang-undang sektor pertanian itu sendiri.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang terhormat,

Untuk menghindari disharmonisasi dari berbagai undang-undang, diperlukan adanya kehati-hatian dalam mengatur sistem budidaya pertanian berkelanjutan, karena sebagian besar kualitas pertanian telah diatur dalam berbagai undang-undang berdasarkan komunikasinya. Kami mengucapkan terima kasih, penghargaan sebesar-besarnya kepada Komisi IV DPR RI yang telah bekerja keras dalam menginisiasi dan menyusun RUU tersebut. Pada saatnya nanti undang-undang ini diharapkan menjadi pedoman dalam melakukan budidaya pertanian secara berkelanjutan. Semoga upaya niat baik dan kerja keras kita semua mendapatkan ridho Allah SWT. Aamiin ya rabal'alaamiin.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih atas pandangan yang disampaikan.

Bapak, Ibu yang kami hormati,

Demikian pandangan dari Pemerintah, acara selanjutnya adalah pengesahan jadwal acara pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Jadwal acara saya pikir sudah ada dimeja kita masing-masing, di bapak, ibu sekalian, saya mungkin tidak perlu membacakan satu persatu karena pembahasan undang-undang ini bukan yang pertama buat kita, mekanismenya jadwal itu sudah kurang lebih hampir sama, tinggal materinya saja yang berbeda-beda. Saya mohon konfirmasi dari pemerintah, setelah rapat kerja hari ini akan ada rapat kerja pembahasan DIM, kita sudah menawarkan tanggal 9 Juli apakah Pak Menteri bisa? Atau nanti biar jadwal diatur, tapi jadwal kita karena menentukan jadwal yang lain juga pak, akan mempengaruhi jadwal yang lain juga.

Apakah tanggal 9 bapak sudah bisa? Untuk pembahasan DIM,

MENTERI PERTANIAN (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Izin pak Ketua, kami upayakan hadir tapi apakah memungkinkan eselon I juga diwakili?

KETUA RAPAT:

Ya tidak bisa karena Raker pak. Jadi harus Menteri, nanti begini saja jadwal nanti kita tentative, saya pikir ya teman-teman seperti biasa, karena waktu menyesuaikan, biar bisa lewat LO yang jelas secara umum jadwal ini bisa kita setuju tidak? Mungkin sebelum ke Pak Menteri teman-teman ada masukan? Kami persilakan dari teman-teman anggota. Pak Sudin? Okey, pak Fachri, Ibu Endang, Pak Budi? Pak Guntur? Pak Tagore? Pak Tagore sudah tenang ini adiknya jadi Bupati sudah amanlah.

Jadi bapak Ibu sekalian, pak Menteri saya pikir kalau jadwal dari kita sudah okey tinggal nanti waktu persisnya, berarti kami persilakan pak Menteri menyampaikan tanggapan terhadap jadwal ini.

MENTERI PERTANIAN (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, MP.):

Kami setuju pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik kita ambil persetujuan tentang jadwal? Kita setuju.

(RAPAT: SETUJU)

Karena memang mekanismenya harus kita setuju.

Selanjutnya adalah pengesahan mekanisme pembahasan RUU, dan lagi dimeja bapak, ibu sekalian sudah ada mekanismenya. Saya pikir mekanismenya sama dengan pembahasan undang-undang lainnya, hanya materinya saja yang berbeda, saya tidak perlu membacakan satu persatu.

Dari Anggota ada tambahan?

Ada koreksi?

Kalau tidak ada kita kembalikan ke pemerintah untuk memberikan tanggapan, kami persilakan pak Menteri.

MENTERI PERTANIAN (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, MP.):

Setuju pak Ketua.

Baik bapak, ibu sekalian, kalau dari Anggota dan DPR dan Pemerintah sudah tidak ada masalah terhadap jadwal dan mekanisme jadi saya pikir kita tinggal melaksanakan satu rapat kerja untuk pembahasan DIM baru nanti akan ada panja-panja apa namanya, panja dan FGD, tinggal nanti kita tentukan. Dijadwal baru ada dua FGD, nanti akan ada dua FGD yang akan menyusul, saya pikir kalau tidak ada lagi agenda lain mungkin dari Kementerian lain yang akan menambahkan Kumham? Dari PU? Dari Menpan, Agraria? Bapak ada cukup.

Baik bapak, Ibu sekalian dengan demikian sebelum saya akhiri saya harus ketok dulu mekanisme pembahasan, tadi pemerintah setuju kita ambil persetujuan teman-teman?

(RAPAT: SETUJU)

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,

Yang terhormat saudara Menteri Pertanian,

Yang terhormat saudara Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional atau yang mewakili,

Yang terhormat saudara Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili,

Yang terhormat saudara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau yang mewakili,

Terima kasih Bu Sekjen sudah hadir,

Yang terhormat saudara Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia atau yang mewakili, yang dalam hal ini mewakili Presiden dalam pembahasan tingkat I RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, serta
Hadirin yang berbahagia.

Dengan demikian berakhir sudah.

Baik sebelum saya akhiri akan ada penyerahan DIM dari pemerintah kepada DPR, kami persilakan pak.

Bapak, Ibu sekalian dengan demikian berakhir sudah acara rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan pemerintah, sebelum saya menutup acara hari ini kami persilakan pemerintah untuk menyampaikan kata penutup pada rapat kerja hari ini.

Kami persilakan.

MENTERI PERTANIAN (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Terima kasih bapak Ketua Komisi IV, Wakil Ketua Komisi IV dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI. Terima kasih support dukungannya selama ini, terkhusus untuk pembuatan rancangan undang-undang kali ini. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik bapak, Ibu sekalian kami mewakili pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi IV mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dalam rapat kerja hari ini, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dengan mengucap Alhamdulillahil'alamiin, rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Presiden atau pemerintah dalam rangka pembahasan tingkat I RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan kami akhiri.

Billahitaufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.
Oom santi santi santi oom.

RAPAT DITUTUP PUKUL 14.00 WIB

Jakarta, 02 Juli 2018

a.n. Ketua Rapat,
Sekretaris Rapat

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
NIP. 196301221991031001